

# IMPLEMENTASI PENERTIBAN REKLAME DI KOTA DUMAI

Oleh:

**LOYAL SEPTIAN ARAFAT SARAGIH**

(e-mail: loyal\_septian@live.com)

**Pembimbing: PROF. DR. H. SUJANTO, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.  
0761-63277

## ABSTRACT

*Advertisement is media that used to convey a message to another people. Advertisement is used in order to promote a product to consumers. Either delivered orally, visually, or a combination of both. The aim of advertisement is to show the customer what product we want to sold. Advertisement itself has a major contribution to the visual impression of an environment. In addition, it has contributions as Pendapatan Asli Daerah (PAD). Thus, in this time, advertisement aims is more often concerned with retribution than the beauty of city, the security of citizen and safety of the environment.*

*The concept theory that used is the theory of implementation of the policy according to Edward III. The indicators in this study, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure. The informant of this study is the Head of Pamong Praja Unit Dumai, Head of Licensing Agency and the Integrated Services Investment town of Dumai, Dumai Head of the Department of Revenue. The complement informants were staff Administrative Civil Pamong Praja Unit Dumai, Owner of advertisement. This research is a qualitative descriptive study using data collection techniques by observation and interviews were obtained from informants study.*

*Based on the research that has been done and based on the data analysis process has been known, it can be showed that controlling advertisement in Dumai running less good or less than optimal. This condition influenced by many things, whether it is a barrier effect of enforcement rules themselves, from the advertisement owner and the citizen in Dumai. Moreover, it is affected by the communication and coordination is among the official parties themselves.*

**Keywords: Implementation, Control, Advertising**

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah dibawah Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada daerah tetapi Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 ini juga harus membawa makna bagi kesejahteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat diwujudkan.

Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila rakyat memiliki

keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses yang cukup untuk masuk ke dalam arena proses pengambilan kebijakan. Adanya ruang yang cukup bagi rakyat untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik yang akan sangat menentukan nasibnya hanya mungkin tercipta jika ada demokrasi.

Demokrasi menuntut penguataan pada sektor rakyat dari pada sektor pemerintahan (birokrasi). Selama dibawah

sistem sentralisasi, birokrasi sangat dominan dalam menentukan segala aktifitas pembangunan yang menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap pelaksanaan pembangunan yang cenderung hanya sebagai objek. Dalam sistem baru yang dianut oleh Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah tersebut, sistemnya di rubah secara total yaitu menempatkan rakyat lebih dominan dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan khususnya dalam kontek penyelenggaraan otonomi daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahanya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

**Tabel 1.1 Data Realisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai Tentang Pajak Reklame pada Tahun 2011, 2012, 2013.**

TAHUN	TARGET	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
2011	1,500,000,000.00	475,762,478.00	31,7%
2012	500,000,000.00	609,342,153.00	121,9%
2013	3,060,000,000.00	652,363,628.00	21,3%

(Sumber: data olahan Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai)

Di tahun 2011 angka Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai untuk pemungutan pajak reklame mencapai Rp.475.762.478,00. Pada tahun berikutnya 2012 angka pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai untuk pemungutan pajak reklame mengalami kenaikan yang signifikan dengan realisasi pendapatan mencapai Rp.609.342.153,00. Dan pada tahun berikutnya 2013 angka Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai mengalami peningkatan, tidak begitu signifikan tetapi tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.652.363.628,00. Dari data tabel diatas berikut penjelasanya maka dapat kita lihat peningkatan setiap tahunnya dalam sektor pemungutan pajak reklame di Kota Dumai. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu :
  1. Pendapatan pajak daerah
  2. Hasil restribusi daerah
  3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000, ditetapkan ada 11 jenis pajak daerah, dengan pembagiannya yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

- a) pajak provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- b) pajak kabupaten/kota, terdiri dari:
  - a. Pajak hotel
  - b. Pajak restoran
  - c. Pajak hiburan
  - d. Pajak reklame
  - e. Pajak penerangan jalan
  - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
  - g. Pajak parkir

Ketentuan di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepada daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, khususnya di era otonomi daerah saat ini dimana kewenangan pemerintah diserahkan secara luas dan nyata kepada kabupaten/kota. Dengan kata lain diharapkan kepada daerah kabupaten/kota di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak selalu terus menerus menggantungkan dana (anggaran) dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Reklame merupakan sarana media informasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada pihak

lain. Reklame digunakan dalam rangka mempromosikan suatu produk kepada konsumen. Baik disampaikan secara lisan, visual, ataupun kombinasi antara keduanya. Dengan memiliki tujuan yaitu agar setiap orang mengetahui produk yang direklamekan.

Penempatan reklame di luar ruangan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan perkotaan karena media reklame seringkali memiliki orientasi lokasi pada jalan-jalan utama perkotaan yang memiliki keuntungan antara lain lokasi strategis, mudah dijangkau, serta kesiapan agar informasinya dapat disampaikan dengan efektif. Reklame sendiri secara visual memiliki kontribusi utama terhadap kesan suatu lingkungan. Selain itu kontribusi yang diberikan kepada pemerintah adalah penerimaan retribusi reklame yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dalam pelaksanaannya lebih sering mementingkan retribusi daripada keindahan kota, keamanan dan keselamatan lingkungan. Bagi pengusaha, reklame merupakan media promosi dari produknya, sehingga dari pemasangan reklame berharap produknya dikenal konsumen atau masyarakat luas. Untuk itu reklame dibuat sebesar mungkin (agar mudah terlihat dan dibaca), setinggi mungkin (agar dari jarak jauh sudah terlihat), dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis. Begitu juga dengan warna dan penerangan yang dipakai agar reklame terlihat mencolok.

Meskipun telah ada regulasi mengenai penyelenggaraan dan penataan reklame, bukan berarti masalah reklame di kota Dumai dapat diselesaikan dengan mudah. Reklame tersebut terkait dengan penempatan papan iklan yang tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2002 Pasal 5 ayat f yang berbunyi “Setiap orang dilarang memasang/menempel/menggantungkan spanduk-spanduk, poster-poster, pamflet-pamflet, dan lain-lain yang sejenis pada tembok-tembok, pagar-pagar, jalan-jalan,

jalur hijau, taman-taman, dan tempat umum lainnya tanpa seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Salah satu ketentuan dalam pemasangan reklame yaitu dalam hal pembayaran pajak reklame itu sendiri yang diatur oleh Undang-undang Nomer 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Adapun objek pajak reklame yang diatur didalam peraturan daerah Kota Dumai Nomer 11 Tahun 2011 dalam pasal 2 ayat 2 yaitu:

- a. Reklame papan/billboard/vidiotorn/mega tron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, fiber glass, kaca, batu logam, yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada tempat lainya;
- b. Reklame kain/spanduk/umbul-umbul/banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, bagor, atau bahan lainya;
- c. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disembarkan, ditempel atau dipasang pada benda lain;
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disembarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakan pada tempat lain;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan;
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara

dengan menggunakan gas, pesawat dan lain yang sejenisnya;

- g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun;
- h. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat yang diproyeksikan dan atau, diperagakan pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi;
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan dan atau tanpa disertai suara;
- j. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dilaut menggunakan kapal, bout, ponton, talk bout dan sejenisnya.

Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengikat seluruh komponen bangsa di salamnya. Oleh karena itu kebijakan merupakan Administrasi Negara, karena di dalam administrasi Negara melibatkan perumus dan pelaksanaan kebutuhan publik.

Menurut **Thomas R. Dye** dan **James Anderson** dalam **Leo Agustino (2012 : 4)** ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa kebijakan publik perlu untuk dipelajari.

- a. Pertimbangan atau alasan ilmiah.

Kebijakan publik dipelajari guna menambah pengetahuan yang lebih dalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Dimana pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik sebagai variabel dependen maupun variabel independen.

b. Pertimbangan atau alasan profesional.

**Don K. Price** dalam **Leo Agustino (2012 : 5)** memberikan pemisah antara scientific-estate yang hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan profesional-estate yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis.

c. Pertimbangan atau alasan politis.

Kebijakan politik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai target. Pertimbangan ini pula yang membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar.

**Robert Eyeston** dalam **Leo Agustino (2012 : 6)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. **Heinz Eulau** dan **Kenneth Prewitt** dalam **Leo Agustino (2012 : 6)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi keputusan tersebut”.

Menurut **Carl Friedrich** dalam **Leo Agustino (2012 : 7)** mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna mengatasi satu/banyak masalah untuk

mencapai tujuan yang dimaksud”. Untuk maksud dari kebijakan sebagai dari bagian kegiatan, **Friedrich** menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

**James Anderson** dalam **Leo Agustino (2012 : 7)** memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut **Anderson** dalam **Winarno (2012 : 21)** kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

Menurut **Anderson** dalam **Winarno (2012 : 23)** mengungkapkan implikasi yang dimiliki dalam konsep kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflansi atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Menurut **Edward III** dalam **Nawawi ( 2009 : 136)** mengatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)  
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu

tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

## 2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (Staff)  
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
- b. Anggaran (Budgetary)  
Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi

atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Fasilitas (facility)  
Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
- d. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)  
Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)  
Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

#### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat tentang implementasi penertiban reklame di Kota Dumai.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Dumai. Lokasi penelitian yang terkait adalah kantor Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Adalah informasi yang diperoleh langsung dari sampel yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Data Primer

dalam penelitian ini adalah data hasil observasi dan wawancara sehubungan dengan Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang menunjang dan relevan dengan penelitian yang diperoleh dari jurnal atau laporan-laporan penelitian yang terdahulu, buku-buku, internet, koran dan sumber lainya yang relevan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara, digabungkan dengan teknik observasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara penelitian informan yang dapat membuka kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang fenomena penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setiap kota di Indonesia selalu berlomba untuk menciptakan suasana kota yang aman, bersih dan tertib. Keseluruhan proses pencapaian diperlukan aturan dalam hal ketertiban umum. Dengan tingginya sebuah ketertiban umum maka sebuah rasa nyaman akan selalu dirasakan oleh masyarakat. Masalah kebersihan, penataan, ketertiban dan ketentraman merupakan permasalahan yang seringkali dijadikan ukuran didalam keberhasilan sebuah kota ataupun daerah, dimana setiap daerah memiliki tanggung jawab yang utuh atas daerahnya. Tentunya saat ini setiap daerah kemudian berlomba menata daerahnya. Yang dimaksud ketertiban umum disini adalah tertib reklame.

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil, dan sebagai suatu akibat, sejauh mana arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Sebagai proses implementasi merupakan rangkaian

mendapatkan informasi tentang obyek penelitian secara langsung dari kata-kata informan.

b. Observasi

Merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung. Data observasi ini didapat dengan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian. Adapun yang diobservasi dalam rencana penelitian ini yaitu Kantor Satpol PP, Dispenda, Tata Ruang, dan BPTPM Kota Dumai.

c. Dokumentasi

Merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai.

keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat atau efek. Maka ciri dari proses adalah kinerja yang tepat dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi berkaitan dengan tingkat seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkat tertinggi implementasi sebagai akibat mengimplementasikan bahwa ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah yang menjadi program.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sedikit banyaknya reklame juga menunjang keuangan daerah yang masuk pada hasil Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyaknya reklame yang terpasang dalam suatu tatanan kota juga berpengaruh terhadap sektor pendapatan kota itu sendiri. Tetapi disini yang perlu di perhatikan adalah tentang ketertiban reklame itu sendiri, apakah sudah tertib atau sebaliknya?

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang menganalisa mengenai Pelaksanaan Penertiban Reklame Di Kota Dumai, Dinas Pendapatan Daerah yang menganalisa tentang pembayaran pajak reklame di Kota Dumai, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang menganalisa tentang izin pemasangan reklame di Kota Dumai dan Dinas Tata Ruang Kota yang menganalisa titik-titik pemasangan reklame. Dari hasil penelitian telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan, meliputi data mengenai Penertiban Reklame di Kota Dumai.

#### **A. Gambaran Pelaksanaan Penertiban Reklame di Kota Dumai**

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ada dalam setiap organisasi. Setiap organisasi apapun bentuknya tentu mengacu kepada keberhasilan dan tepat dalam pencapaian sasaran pekerjaan dan tujuan-tujuan tertentu secara maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dapat dikatakan bahwa salah satu unsur yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya yaitu memberikan hasil yang bagus dan berkualitas dari realisasi organisasi yang ada, karena realisasi tujuan yang ada merupakan gambaran yang nyata dari tercapainya tujuan dari sebuah organisasi tersebut.

Melihat masih adanya permasalahan dalam pencapaian Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai, maka penulis melakukan penelitian tentang bagaimana Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai dengan indikator hasil sebagai berikut:

##### **1. SOP Pemasangan Reklame**

SOP (Standard Operasional Prosedur) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan

dikomunikasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten oleh para pelaku.

Dalam suatu kegiatan pekerjaan harus memiliki acuan serta pedoman. Akibat dari tidak adanya acuan dalam pelaksanaan pekerjaan banyak membuat organisasi tidak berfungsi dengan baik, hal ini dikarenakan para karyawan bingung atas pekerjaan yang mereka akan kerjakan selanjutnya, dan pihak manajemenpun tidak mempunyai pedoman dalam pengambilan keputusan sehingga apabila ada suatu kesalahan atau kekeliruan tidak bisa dianalisis dimana kesalahan itu terjadi karena tidak memiliki alur pedoman yang jelas.

Tidak adanya acuan serta pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi di lingkungan pemerintahan maupun instansi negara banyak dikeluhkan oleh para masyarakat, karena dengan tidak adanya acuan pelayanan administrasi menyebabkan proses pelayanan menjadi terasa rumit, lamanya pelayanan dan mengindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Sehingga timbulah istilah apabila bisa diperlambat mengapa dipercepat, bagaimana cara mempercepatnya? Dengan uang sogokan.

Dalam memahami kegiatan dalam suatu pekerjaan dengan baik setiap organisasi harus memiliki acuan, instruksi ataupun prosedur kerja. Karena dengan adanya prosedur atau acuan ini para karyawan, atasan, manajemen maupun masyarakat mendapatkan suatu kejelasan serta kemudahan transparansi dalam setiap prosedur pelayanan yang diberikan.

Standard operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka itu seharusnya setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki Standard Operasional Prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasilkerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang.

## **2. Pelaksanaan Penertiban**

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan penertiban reklame, tim teknis berfungsi untuk menertibkan reklame-reklame yang telah lewat masa izinya yang berada dititik lokasi penempatan pemasangan reklame.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dimaksud adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Komunikasi sangat penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, dan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan haya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Komunikasi bisa juga merupakan alat pengiriman atau penyampaian perintah-perintah dan arahan informasi yang bertujuan menghasilkan dampak yang merupakan aspek kognisi maupun efeksi. Hubungan komunikasi dengan implementasi tidak hanya dilihat dari lancar atau tidaknya pengirimian untuk penyampaian perintah. Untuk perintahan dan arahan pelaksanaan program dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana serta dari pelaksana memberikan informasi kepada kelompok sasaran saja yang secara riil mereka-mereka yang akan melaksanakan program.

Ketidakjelasan perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan oleh pembuat kebijakan akan memberikan pelaksana dilapangan pada situasi yang tidak pasti dalam mengimplementasikan kebijakan. Ini berarti juga menghadapkan para pelaksana dalam keadaan kesukaran dalam mengirimkan perintah dan arahan (informasi) kepada kelompok sasaran. Akibatnya akan menimbulkan misunderstanding (salah pengertian) atau kesalahan dalam menginterpretasikan kebijakan dari masing-masing pelaksana lapangan.

Transmisi kejelasan perintah dan arahan mengandung maksud khususnya tentang apa yang harus dihasilkan oleh para pelaksana dan bagaimana mencapai hal tersebut. Untuk mencapai hasil tujuan harus dirumuskan dalam ukuran-ukuran yang jelas dan tetap. Dengan demikian, para pelaksana dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan.

Implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi sehingga kebijakan akan berjalan efektif dan menghindari kontradiksi perintah untuk melaksanakan kebijakan. Tetapi jika terjadi sebaliknya ini akan membingungkan para pelaksana, akibatnya pelaksana ragu-ragu untuk mengimplementasikan kebijakan.

Kegiatan yang berlangsung antara komunikator dan komunikan, dalam rangka penyampaian pesan yang memiliki

suatu tujuan tertentu. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan-kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

a. Transmisi

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, Ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah di buat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan yang belum berjalan atau telah berjalan tetapi diabaikan, dan ini salah satu penyebab kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

b. Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksanaan kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi.

c. Konsistensi

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan

memudahkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

Implementasi memerlukan sumberdaya yang memadai, sebab bagaimana baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan, tanpa adanya dukungan sumberdaya implementasi akan mengalami hambatan bahkan mungkin mengalami kegagalan. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Berarti tanpa adanya sumberdaya yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumberdaya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan harapan.

Dukungan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan serta saprodi (sarana dan prasarana produksi). Selain sumberdaya yang berupa staff pelaksana, dukungan fasilitas yang tidak kalah pentingnya adalah sumberdaya wewenang, sebab dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pelaksana dapat mengimplementasikan secara efektif. Para pelaksana merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan itu pasti memerlukan dukungan staff atau para pelaksana yang memadai.

3. Disposisi / Sikap Pelaksana

Arahan respon para pelaksana lapangan ini berhubungan dengan beban tugas yang diberikan oleh pembuat

kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan harus mengetahui dan memahami kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana lapangan. Jika beban itu diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan, maka ini akan mengakibatkan adanya rasa penolakan terhadap tugas yang diberikan. Disamping itu juga para pembuat kebijakan harus dapat memberikan intensif atau rangsangan kepada para pelaksana lapangan. Jadi tidak hanya yang diberikan, tetapi keperluan para pelaksana dilapangan juga harus diperhatikan. Sebab adanya rangsangan tidak mungkin mereka akan bekerja sebagaimana mestinya. Ini sesuai dengan kodrat manusia yang mempunyai keinginan dan kebutuhan.

Dengan adanya insentif mereka akan terdorong untuk melaksanakan program. Para pelaksana pada dasarnya merupakan bagian dari para pembuat kebijakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi bisa juga merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan publik dan merupakan implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

#### C. Temuan Hasil Penelitian

Didalam pembahasan sebelumnya, berdasarkan proses analisis data maka telah di ketahui bahwa penertiban reklame Di Kota Dumai berjalan kurang baik atau kurang optimal. Kurang baik atau kurang optimalnya penertiban reklame di Kota Dumai karena dipengaruhi oleh berbagai hal, baik itu pengaruh berupa hambatan dari penegak aturan itu sendiri, dari pemilik reklame serta masyarakat. Berdasarkan data-data yang penulis sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan hambatan-hambatan dalam penertiban reklame di Kota Dumai antaranya adalah:

##### 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dan Finansial Pihak Satpol PP

Terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak Satpol PP membuat pengawasan tidak bisa dilakukan secara terus menerus atau 1x24 jam dikarenakan banyaknya permasalahan ketertiban umum lainnya membuat permasalahan ini kurang ditangani oleh pihak terkait. Hal ini menjadi salah satu penghambat bagi dinas terkait dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan juga penertiban dilapangan. Salah satu

faktor penghambat yang juga cukup mempengaruhi adalah finansial. Karena salah satu tujuan orang bekerja karena adanya faktor motif finansial.

## 2. Kurang Komunikasi Dan Koordinasi Dari Pihak Terkait

Koordinasi dari pihak-pihak terkait yang kurang, menjadikan pelaksanaan penertiban reklame kuarang berjalan maksimal.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai Penertiban Reklame di Kota Dumai maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan indikator-indikator yang telah dipakai yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, belum berjalan secara optimal. Masih adanya reklame-reklame yang berdiri dengan kokoh walaupun sudah lewat masa berlakunya. Ini dikarenakan terdapat masalah-masalah atau faktor yang menghambat Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai adalah, terbatasnya sumber daya manusia dan finansial pihak Satpol PP, kurangnya koordinasi dari pihak terkait. Dan juga faktor yang mempengaruhi Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai adalah, komunikasi antara pihak BPTPM sebagai pembuat keputusan koordinasi dengan Satpol PP belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukanya

reklame-reklame yang telah habis masa kadaluarsanya tetapi masih berdiri kokoh dan tidak ditertibkan. Kurangnya komunikasi terhadap pemilik reklame sehingga pada masa akhir berlakunya reklame tersebut, reklame tidak diambil oleh pemiliknya, dan hal itu juga akan menimbulkan kecurangan-kecurangan yang bisa saja diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Lebih di tingkatkannya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait terhadap papan reklame di Kota Dumai baik dalam segi waktu yang lebih intensif, serta lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan operasional di lapangan.
2. Melakukan tindakan evaluasi terhadap setiap kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam penertiban reklame di Kota Dumai yang dapat dilakukan dengan salah satu upaya yaitu manajemen lebih baik dalam bidang pendataan laporan- laporan pelanggaran yang terjadi sehingga dapat menjadi penilaian dalam pengawasan serta penertiban reklame di Kota Dumai.
3. Dalam melakukan pengawasan dan penertiban, satpol pp bersama dengan dinas terkait diharapkan melakukan patroli rutin setidaknya 3 bulan sekali. Sehingga dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
4. bersikap tegas dan objektif dalam memberikan sanksi kepada pelaku pendiri reklame yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku sehingga dapat memberikan efek

jera dan meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi.

Saran bagi pemerintah Kota Dumai agar menambah jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang mana sebagai penertib reklame di lapangan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal. Agar pemerintah Kota Dumai dapat lebih memperhatikan operasional tempat pemasangan reklame di Kota Dumai dengan melakukan evaluasi kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, agar mempermudah bagi

Satpol PP dan dinas terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta tidak terjadi kerancuan petugas dalam melaksanakan tugas dilapangan. Terkait dengan reklame, saya berharap kepada pemerintah Kota Dumai membuat aturan khusus mengenai aturan khusus mengenai koordinasi antara dinas-dinas yang terkait, dan tata cara pemasangan dan pembongkaran reklame. Sehingga lebih jelas dan dimengerti dan tidak terjadi kerancuan bagi seluruh dinas-dinas yang terkait di Kota Dumai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Alfabeta

Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Gramedia : Jakarta.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy : Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Gramedia : Jakarta.

Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi*

*Teori dan Praktek*. Surabaya : Penerbit PNM.

Nogi, Hessel. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Balairung

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Gramedia.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.

Sujianto . 2008. *Implementasi Kebijakan Publik , Konsep Teori dan Praktek* , Alaf Riau dan Prodi Ilmu Admistrasi Negara (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau Pekanbaru

### B. SKRIPSI

Nurhasanah. 2013. Implementasi Kebijakan Pendirian Minimarket/ Swalayan dan Dampak Terhadap Warung-Warung Tradisional di

Kelurahan Simpang Baru  
Kecamatan Tampan Kota  
Pekanbaru.

Ricca, Jenny. 2012. Implementasi  
Kebijakan Perlindungan Anak di Kota  
Pekanbaru.